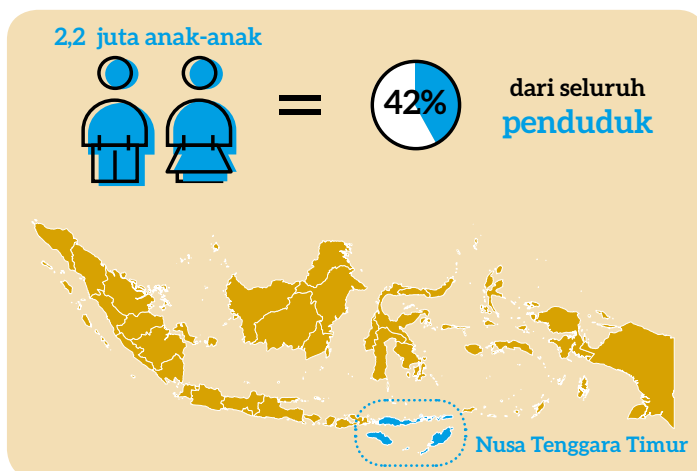




Pendahuluan

Profil singkat provinsi ini menyajikan indikator-indikator prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang terkait anak, berdasarkan survei nasional berbasis rumah tangga dan sumber data lainnya. Profil ini melengkapi *Laporan Baseline SDG tentang Anak-Anak di Indonesia* yang disusun oleh BAPPENAS dan UNICEF, untuk mendukung pemantauan dan penyusunan kebijakan berbasis bukti.

Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau biasa disebut NTT, termasuk provinsi dengan jumlah muda yang signifikan. Sebanyak 2,2 juta orang atau 42 persen dari total jumlah penduduk di provinsi ini adalah anak-anak. Delapan dari 10 anak tinggal di daerah perdesaan. Diperlukan investasi strategis yang lebih signifikan untuk anak-anak dalam rangka mempercepat pencapaian SDG di provinsi ini.

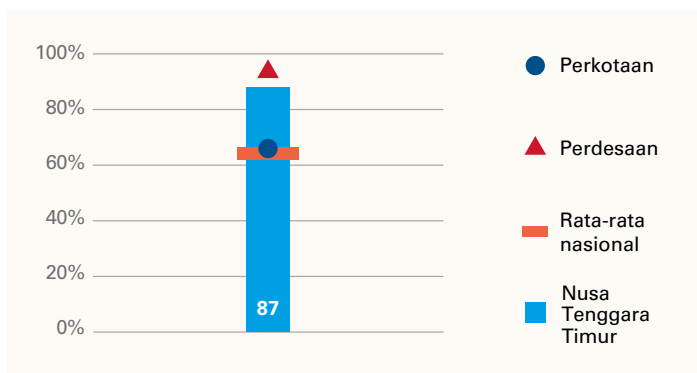


TUJUAN 1 PENGENTASAN KEMISKINAN



Hampir 600.000 anak (27 persen) hidup di bawah garis kemiskinan provinsi pada tahun 2015 (Rp 9.793 per orang per hari). Namun, lebih banyak rumah tangga yang berada dalam posisi kemiskinan dan hidup dengan pendapatan yang sedikit di atas garis kemiskinan. Selain itu, hampir sembilan dari 10 anak mengalami deprivasi di dua dimensi kemiskinan non-pendapatan atau lebih, dengan tingkat deprivasi yang lebih tinggi di wilayah perdesaan.¹

Kondisi kemiskinan anak multidimensi di provinsi Nusa Tenggara Timur



	Persen	Jumlah (juta)
Populasi di bawah garis kemiskinan nasional	22,6	1,2
Anak-anak < 18 di bawah garis kemiskinan nasional	27,1	0,6
Anak-anak < 18 di bawah dua kali garis kemiskinan	73,9	1,7

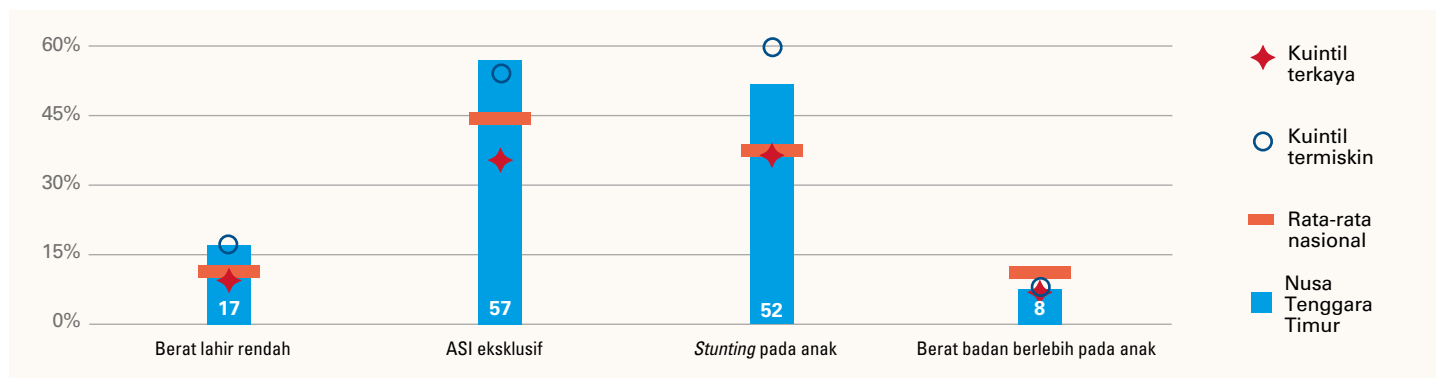
TUJUAN 2 PENGENTASAN KELAPARAN



Menerapkan praktik pemberian makan yang optimal sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak. Dengan angka ASI eksklusif 57 persen, NTT adalah provinsi berkinerja terbaik ketiga di Indonesia.

Namun malnutrisi pada anak masih tersebar luas, bahkan di kalangan rumah tangga yang lebih kaya. Sekitar 17 persen bayi lahir dengan berat badan rendah, dan lebih dari setengah anak di bawah lima tahun mengalami *stunting* (tinggi badan rendah dibandingkan usia) pada tahun 2013.

Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan dalam hasil pemberian makanan dan gizi anak



TUJUAN 3

KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN



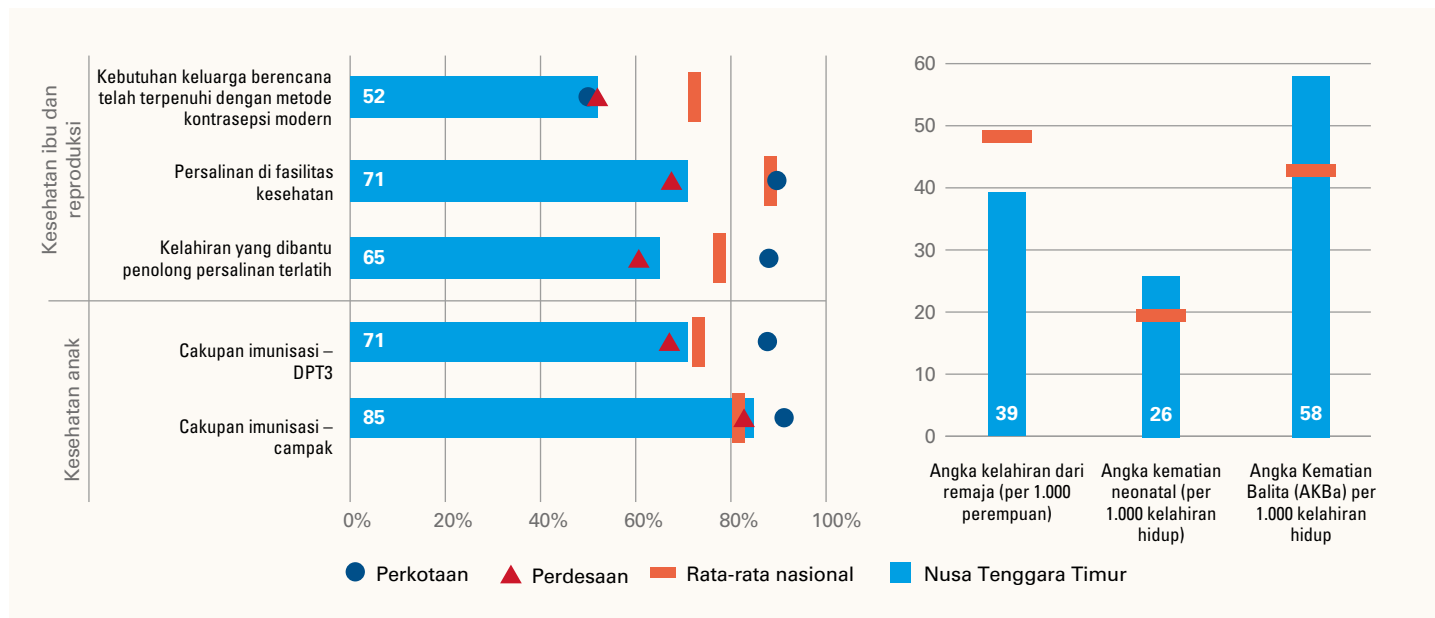
Meskipun sudah ada kemajuan, angka kematian anak masih menjadi tantangan yang signifikan. Dari setiap 1.000 kelahiran hidup, 26 bayi yang baru lahir meninggal pada bulan pertama kehidupan dan 58 meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun.

Peningkatan akses perempuan terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi sangat penting. Hanya setengah perempuan dewasa dan remaja usia 15–49 yang kebutuhan keluarga

berencananya terpenuhi dengan metode kontrasepsi modern pada tahun 2015, dan tiga dari 10 kelahiran tanpa dibantu penolong persalinan terlatih. Selain metode keluarga berencana, akses terhadap layanan kesehatan bagi ibu dan anak juga lebih rendah di wilayah perdesaan.

Cakupan asuransi kesehatan dan imunisasi rutin di Provinsi NTT lebih tinggi dari atau sama dengan rata-rata nasional.

Ketimpangan berdasarkan wilayah pada kesehatan ibu dan anak



TUJUAN 4

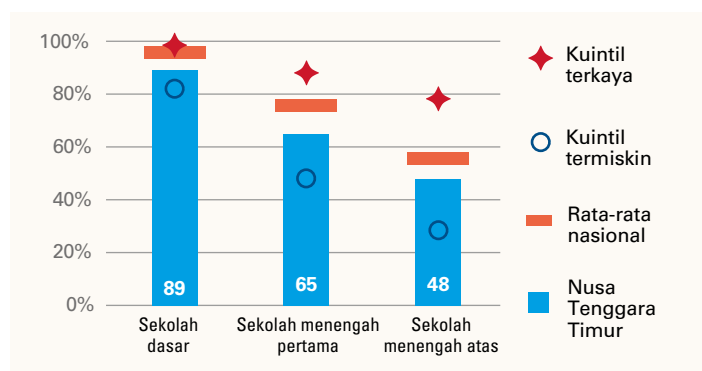
PENDIDIKAN BERKUALITAS



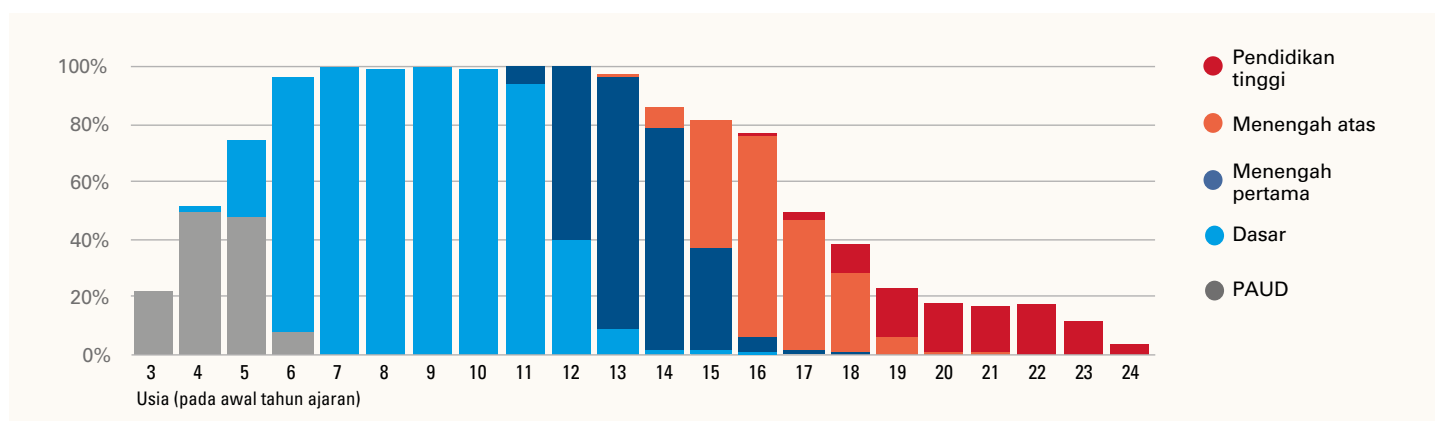
Kesiapan untuk masuk sekolah, perkembangan kognitif, dan pertumbuhan anak dapat ditingkatkan melalui program perkembangan anak usia dini. Angka partisipasi dalam pembelajaran PAUD yang terorganisir di kalangan anak usia 6 tahun mencapai 93 persen pada tahun 2015, meskipun banyak anak usia pra-sekolah sudah masuk sekolah dasar. Provinsi NTT hampir mencapai akses universal pendidikan dasar. Namun, anak-anak dari rumah tangga termiskin berpeluang jauh lebih rendah untuk menyelesaikan sekolah menengah dibandingkan anak-anak dari keluarga yang paling kaya.

Kualitas pendidikan masih menjadi masalah utama. Hanya setengah dari anak sekolah dasar mampu mencapai ambang batas nasional minimum dalam kemampuan membaca dan seperempat anak dalam kemampuan matematika.

Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan pada angka penyelesaian sekolah



Persentase anak-anak yang masuk sekolah berdasarkan usia



TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER



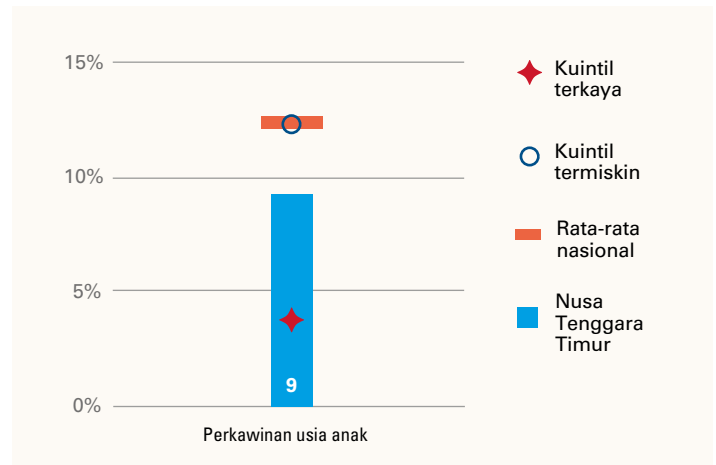
Praktik perkawinan usia anak telah menurun, meskipun praktik ini masih ada. Sekitar 9 persen perempuan usia 20–24 tahun sudah menikah atau hidup bersama sebelum berusia 18 tahun pada tahun 2015, yang berarti di bawah rata-rata nasional sebesar 12 persen. Tingkat perkawinan usia anak tertinggi di kalangan anak perempuan dari rumah tangga termiskin.

Tidak ada data yang representatif tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di tingkat provinsi. Namun, data dari survei nasional menunjukkan bahwa jenis kekerasan ini tersebar luas: Sebanyak 28 persen dari perempuan dan anak perempuan yang pernah memiliki pasangan pernah mengalami kekerasan fisik, seksual dan/atau psikologis yang dilakukan oleh mantan atau pasangan intimnya saat ini.

9% perempuan menikah sebelum berusia 18



Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan pada perkawinan usia anak



TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI

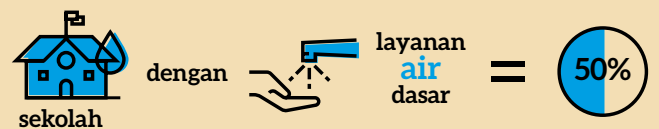
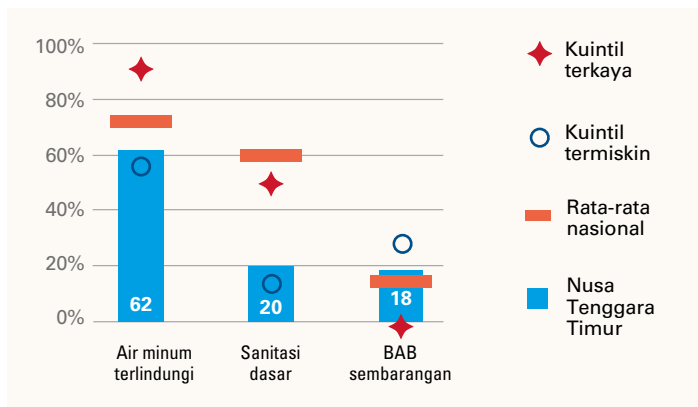


NTT adalah provinsi dengan cakupan sanitasi terendah di Indonesia. Pada tahun 2015, hanya satu dari lima orang menggunakan fasilitas sanitasi dasar di rumah, sementara 18 persen masih mempraktikkan BAB sembarangan. Hanya sedikit sekolah (41 persen) sudah memiliki fasilitas toilet terpisah untuk laki-laki dan perempuan. Akses terhadap sumber air minum yang layak sudah

lebih tinggi, baik di rumah tangga maupun sekolah.²

Ketimpangan berdasarkan kekayaan dan tempat tinggal sangat mencolok, yang menunjukkan pentingnya mengintegrasikan prinsip keadilan ke dalam kebijakan dan praktik. Sejumlah kemajuan sudah dicapai melalui penerapan program sanitasi total berbasis masyarakat.

Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan pada akses air dan sanitasi



Lingkungan sekolah

Sekolah dengan layanan air dasar (%)	50
Sekolah dengan fasilitas sanitasi terpisah menurut jenis kelamin (%)	41

Komunitas

Desa dan kelurahan yang menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (%)	62
--	----

TUJUAN 16

PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG KUAT

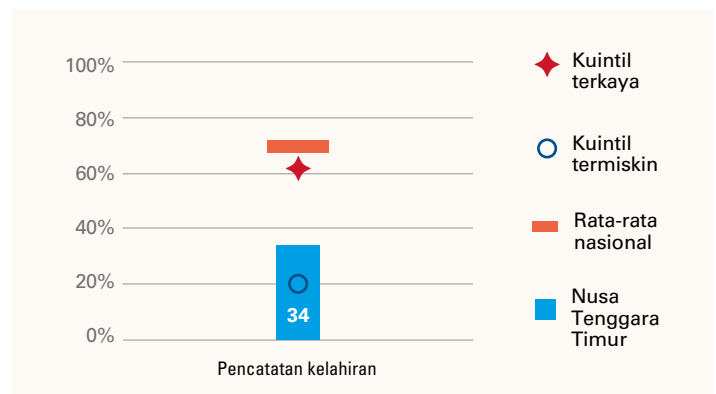


Peningkatan cakupan pencatatan kelahiran sangat penting: hanya satu dari tiga anak di bawah usia 5 tahun telah memiliki akta kelahiran pada tahun 2015. Masih terdapat perbedaan besar antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan berdasarkan status kekayaan rumah tangga, yang disebabkan hambatan keuangan dan ketersediaan pelayanan (*supply-side barriers*).

Anak dalam tahanan masih menjadi bentuk hukuman yang umum bagi anak yang melakukan tindak pidana, yang mana hal ini melanggar prinsip bahwa penahanan anak harus merupakan pilihan terakhir. Namun, di Provinsi NTT, hanya 1 persen dari seluruh anak yang ditahan belum mendapatkan putusan pengadilan, sehingga NTT adalah provinsi berkinerja terbaik kedua di dalam hal ini.

Hanya ada sedikit atau tidak ada data sama sekali tentang masalah perlindungan anak lainnya, seperti kekerasan terhadap anak maupun perdagangan anak.

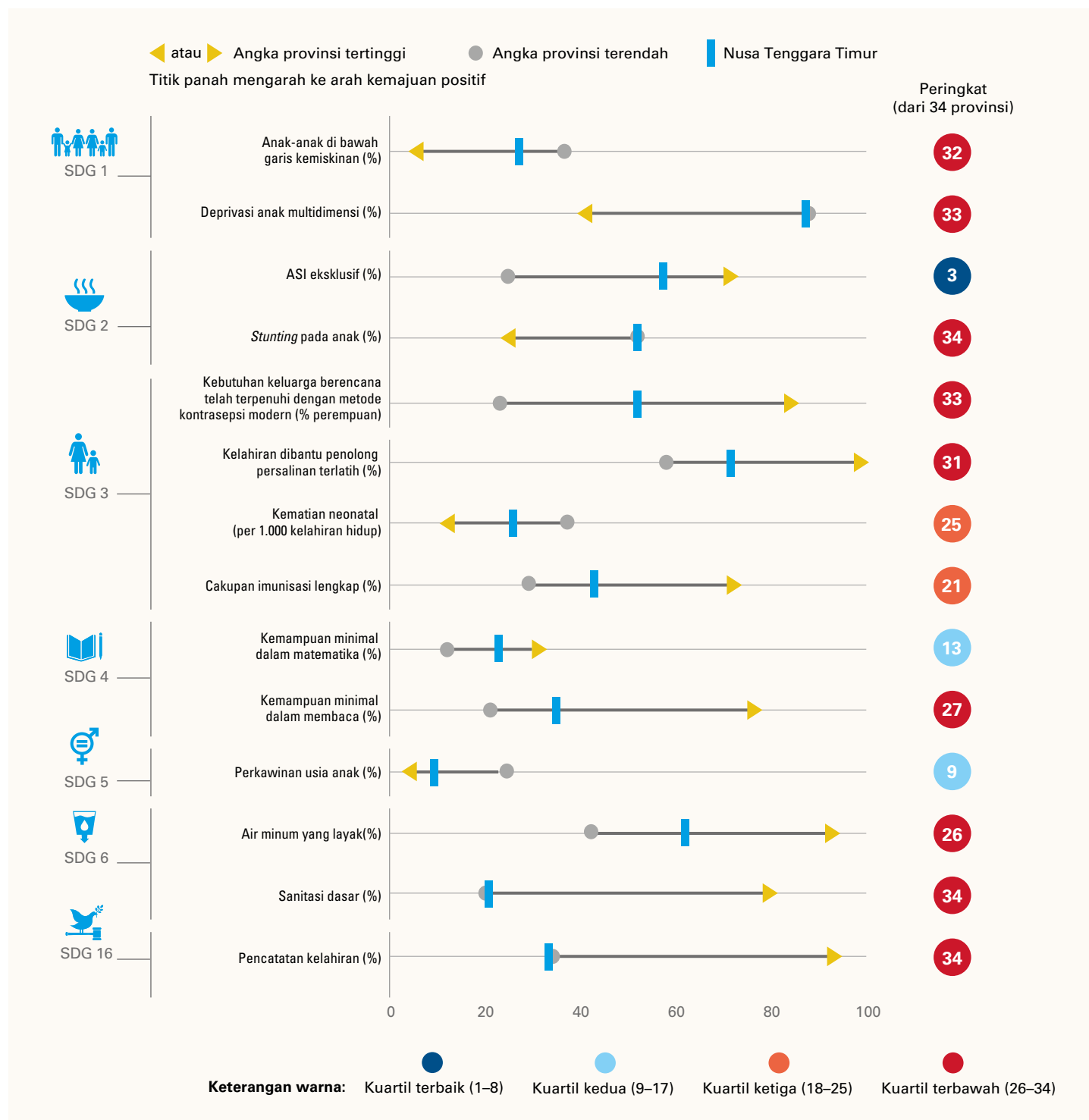
Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan pada pencatatan kelahiran



KARTU NILAI (SCORECARD) PROVINSI

Kartu nilai ini berisi ringkasan kinerja Provinsi NTT dalam beberapa indikator SDG dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Grafik di bawah ini menunjukkan nilai rata-rata Provinsi NTT dan provinsi-provinsi dengan nilai tertinggi dan terendah untuk tiap indikator.

Di sisi kanan tercantum peringkat Provinsi NTT untuk setiap indikator, yaitu antara peringkat 1 untuk kinerja tertinggi dan 34 untuk kinerja terendah. Data menurut provinsi di Indonesia dibagi menjadi empat kuartil (biru tua untuk kuartil terbaik dan merah untuk kuartil terbawah).



Catatan

Sumber: Survei rumah tangga nasional (SUSENAS, RISKESDAS, SDKI) dan data administratif (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan). Informasi detail tentang sumber data dan definisi indikator tersedia *online* di: <https://sdg4children.or.id>

- 1 Kemiskinan anak multidimensi didefinisikan sebagai anak-anak yang mengalami deprivasi pada setidaknya dua dimensi berikut: pangan dan gizi; kesehatan; pendidikan; perumahan; air dan sanitasi; dan perlindungan.
- 2 Saat ini, Indonesia masih belum memiliki data nasional yang representatif tentang kualitas air yang dapat digunakan untuk menghitung indikator SDG terkait penggunaan layanan air minum yang dikelola secara aman. Namun setidaknya telah digunakan indikator *proxy* dalam menyusun *baseline data* untuk SDG 6.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami di: jakarta@unicef.org